



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKB, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : I
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Ditjen Binalattas Kemenakertrans RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Kamis, 20 Oktober 2011
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Acara : Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2012 Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
Ketua Rapat : Ir. Soepriyatno/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI;
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : orang dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI
orang Izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 10.25 WIB oleh Ir. Soepriyatno/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR-RI dapat menerima Pagu Sementara/Anggaran Direktorat Jenderal Binalattas Kemenakertrans RI Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp 975.049.791.000** (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) dan usulan tambahan anggaran sebesar **Rp 1.585.750.000.000** (*Satu Trilyun Lima Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan catatan harus memprioritaskan kepada program-

program peningkatan produktivitas dan pelatihan kerja yang terstandar kompetensinya dengan melakukan penyesuaian sehingga target 1 (satu) juta lapangan kerja Kemenakertrans RI di tahun 2012 dapat tercapai.

2. Komisi IX DP-RI meminta Direktorat Jenderal Binalattas Kemenakertrans RI melakukan sinergi dan koordinasi dengan Dirjen Binapenta Kemenakertrans RI dan BNP2TKI sehingga tidak ada program dan kegiatan terkait pelatihan dan pemagangan yang tumpang tindih.
3. Komisi IX DPR-RI meminta Direktorat Jenderal Binalattas Kemenakertrans RI untuk menyampaikan data alokasi anggaran dari pusat ke daerah pada Tahun 2011 beserta realisasinya di tiga provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi tujuan Kunker Komisi IX DPR RI pada reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, paling lambat hari Rabu, 26 Oktober 2011.

Rapat diakhiri pada pukul 11.55 WIB

**Jakarta, 20 Oktober 2011
PIMPINAN KOMISI IX DPR-RI
Wakil Ketua,**



Ir. SOEPRİYATNO